KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas diperlukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu disusun sebuah program kerja yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Selanjutnya program kerja tersebut diberi nama Roadmap Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Balai Besar Kimia dan Kemasan dengan rentang waktu selama 3 tahun (2017-2019). Pembangunan Zona Integritas akan membutuhkan waktu yang cukup panjang terutama terkait dengan upaya perubahan pola pikir dan budaya. Oleh karena itu, implementasinya harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang optimal.

Kami yakin bahwa dokumen ini masih memerlukan perbaikan, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen. Terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2017
a.n Kepala BBKK

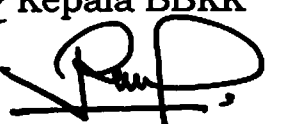

ROY SIANIPAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BBKK

D. KONDISI DAN PERMASALAHAN

E. TARGET PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

F. ROADMAP PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

G. RENCANA AKSI DAN PEMANTAUAN PELKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : MATRIK ROADMAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN

LAMPIRAN 2 : MATRIK RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA UNIT KERJA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN TAHUN 2017

LAMPIRAN 3 : MATRIK PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 7 April 2015, Menteri Perindustrian telah mendeklarasikan bahwa Kementerian Perindustrian telah menetapkan untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Konsekuensi logis dari pendeklarasian tersebut adalah komitmen dari seluruh jajaran yang berada di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan program-program yang ditetapkan dalam area perubahan Zona Integritas.

Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada **instansi pemerintah** yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian menetapkan bahwa Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian harus melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Unit Kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Untuk membangun instansi pemerintah menuju WBK dan WBBM diperlukan program-program yang tepat serta melakukan implementasinya pada 6 area pengungkit dalam zona integritas yaitu : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tata Laksana, 3) Penataan Sistem Manajemen Sumber

Daya Manusia, 4) Penguatan Akuntabilitas, 5) Penguatan Pengawasan, 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan dilaksanakannya program yang terdapat dalam 6 komponen pengungkit tersebut maka diharapkan hasil akhir dari pembangunan Zona Integritas tersebut yaitu : Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN serta Tingginya Kualitas Pelayanan Publik dapat terwujud.

Sebagai panduan dalam Pembangunan Zona Integritas tersebut maka BBKK perlu menyusun Roadmap Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dalam rentang waktu 3 tahun ke depan. Untuk selanjutnya perlu disusun pula rencana aksi tahunan yang menggambarkan rincian kegiatan yang harus dikerjakan dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen ini merupakan Roadmap Program Pembangunan Zona Integritas yang akan digunakan sebagai panduan ringkas selama pada periode 2017-2019. Dengan disusunnya Roadmap ini maka diharapkan agar dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi, implementasi, maupun dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Besar Kimia dan Kemasan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya yang sadar dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka perbaikan kinerja melalui upaya perubahan dan perbaikan dalam 6 aspek pengungkit/perubahan untuk mencapai 2 tujuan yaitu : (1) pemerintahan yang bersih

dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta (2) pemerintahan yang melayani publik secara prima.

Untuk mencapai 2 tujuan tersebut maka arah dari pembangunan Zona Integritas terebut adalah pemerintahan yang secara konsisten berupaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta pemerintahan yang terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Atas dasar itu semua maka tujuan pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Kimia dan Kemasan harus pula sejalan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas di Kemenperin RI maupun program reformasi birokrasi.

C. TUJUAN SASARAN STRATEGIS BBKK

Program pembangunan Zona Integritas sebaiknya bukan merupakan program sempalan yang terlepas dari program BBKK secara keseluruhan. Oleh karena itu, program Pembangunan Zona Integritas harus menjadi bagian integral dari program BBKK, sehingga perlu dilakukan harmonisasi program kerja dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Kimia dan Kemasan.

Sesuai dengan RPJMP 2015-2019 dan capaian kinerja tahun sebelumnya serta permasalahan BBKK saat ini, maka tujuan yang ingin dicapai BBKK periode tahun 2015-2019 yaitu "Meningkatkan daya saing industri kimia dan kemasan melalui kegiatan litbang dan layanan jasa teknis".

D. KONDISI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka menyusun Program Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi hal-hal yang menjadi kelemahan dan memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis dan kajian Tim Monitoring Jasa Pelayanan terhadap penyelenggaran tugas pokok BBKK diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Pada tahun 2016 keterlambatan pengujian mencapai 12.57% dari target sebesar 10% sementara keterlambatan kalibrasi alat mencapai 18% dari target hanya 2%.

b. Kebijakan sistem PTSP perlu ditingkatkan. PTSP diyakini salah satu cara untuk menuju pelayanan yang prima dan juga berdampak adanya efisien dalam pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh pelanggan/konsumen.

c. Sistem informasi manajemen dan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Laboratorium, Sistem Informasi Kalibrasi, Sistem Informasi Sertifikasi, Sistem Informasi Pelatihan, perlu dimaksimalkan fungsinya terutama dalam mendukung pelayanan publik.

d. Makna pelayanan prima dan pembangunan zona integritas belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai BBKK.

e. Terdapat 15 orang PNS yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) tahun 2017 sehingga BBKK akan mengalami kekurangan jumlah SDM yang memiliki keahlian dan pengalaman.

f. Tarif jasa pelayanan yang dimiliki perlu dilakukan peninjauan ulang mengingat terdapat beberapa jasa layanan yang belum masuk tarif maupun tarif yang perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai kebijakan tarif yang ada.

E. TARGET PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Atas dasar kendala dan kelemahan pelaksanaan tugas pokok seperti disebutkan di atas maka program pembangunan zona integritas ditekankan pada pencapaian target sebagai berikut :

Tahun 2017:

1. Pegawai BBKK memiliki pemahaman yang utuh tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai BBKK.
2. Terbangunnya Sistem Informasi untuk seluruh layanan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.
3. Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik dan pengembangan PTSP.
4. Meningkatnya kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan kinerja BBKK sebagai unit kerja yang melayani publik.
5. Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan sesuai Perjanjian Kinerja.
6. Diterapkannya *reward* terhadap pelaksana pelayanan publik.

Tahun 2018 :

1. Penataan pegawai sesuai kompetensi.
2. Dikembangkannya sistem informasi sebagai pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam pelayanan publik.
4. Terwujudnya optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk semua jenis layanan Balai Besar Kimia dan Kemasan.
5. Terwujudnya BBKK sebagai Unit Kerja dengan predikat WBK.

Tahun 2019:

1. Terwujudnya BBKK sebagai Unit Kerja dengan predikat WBBM.

F. ROADMAP PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

Roadmap Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dalam tahun 2017-2019 dilakukan pada 6 area perubahan yang didasarkan pada kondisi saat ini pada masing-masing area dikaitkan kondisi yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

Komponen Pengungkit/Area Perubahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang diharapkan
A. Manajemen Perubahan	Masih terdapat sebagian kecil pegawai yang terlambat masuk kerja.	Meningkatnya disiplin seluruh pegawai.
	Tidak seluruh pegawai mau memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.	Seluruh pegawai dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas.
	Tidak semua pegawai memahami rencana pembangunan Zona Integritas.	Semua pegawai memahami rencana pembangunan Zona Integritas.
	Belum semua pegawai memahami kode etik PNS sesuai Permenperin No. 30/M-IND/PER/6/2013	Pegawai BBKK memahami kode etik PNS.
	Perlu peningkatan kesadaran tentang pentingnya kualitas dan produktivitas kerja	Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kualitas dan produktivitas kerja
B. Penataan Tata Laksana	SOP-AP yang ada masih harus terus disempurnakan	Tersedianya SOP-AP yang selalu mutahir sesuai dengan tugas pokok
	Sistem Informasi belum optimal dalam membantu pelayanan publik	Sistem Informasi Mendukung Pelayanan Publik Secara Optimal
	Sebagian pekerjaan pengelolaan SDM dilakukan secara manual	Intranet BBKK dan informasi kepegawaian dapat mendukung pengelolaan informasi SDM BBKK
	Fasilitas tata laksana pada intranet Kemenperin belum digunakan secara optimal	Fasilitas tata laksana perkantoran Intranet Kemenperin dapat dioptimalka
C. Penataan Manajemen SDM	Belum ada pemerataan beban kerja diantara pegawai	Beban kerja yang merata dan sesuai dengan jabatan dan kompetensi
	Perlu adanya *reward* untuk pegawai	Tersedianya *reward* bagi pegawai
	Belum ada SOP tentang rotasi pegawai BBKK	Tersedianya SOP rotasi pegawai BBKK
	Standar kompetensi jabatan belum detail	Adanya standar kompetensi jabatan yang lebih detail
	Banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun	Kompetensi SDM pensiun dapat ditularkan kepada pegawai lain
	Sebagian data pegawai perlu dimutahirkan	Data pegawai mudah diperoleh dan selalu mutahir

Komponen Pengungkit/Area Perubahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang diharapkan
D. Penguatan Akuntabilitas	Renstra BBKK perlu selalu dikaji secara berkala.	Renstra BBKK dikaji secara berkala.
E. Penguatan Pengawasan	Belum seluruhnya aktivitas BBKK dilakukan penilaian resiko	Semua kegiatan baik yang strategis maupun teknis telah dilakukan penilaian resikonya
	Perlu ditingkatkannya implementasi *whistle blowing system*	Pegawai dapat memanfaatkan fasilitas *whistle blowing system*
	Perlu ditingkatkannya implementasi penanganan benturan kepentingan di BBKK	Meningkatnya implementasi penangananan benturan kepentingan di BBKK
	Perlu melakukan peninjauan kembali atas Standar Pelayanan Minimal BBKK	Standar Pelayanan BBKK sudah sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi
F. Peningkatan Pelayanan Publik	Perlunya peningkatan mutu pelayanan publik	Meningkatnya mutu pelayanan publik
	Perlunya informasi tentang kepuasan pelanggan dan integritas pelayanan publik	Tersedianya informasi tentang kepuasan pelanggan dan integritas pelayanan publik

Roadmap Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

G. RENCANA AKSI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2017

Rangkaian Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Kimia dan Kemasan untuk tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sementara itu format Pemantauan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahunan dapat dilihat pada Lampiran 3.

KEPALA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN

ROY SIANIPAR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

MATRIK ROADMAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN

No	Area Perubahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Program/Kegiatan	Tahun		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Manajemen Perubahan						
		Masih terdapat sebagian kecil pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin	Meningkatnya disiplin seluruh pegawai	Monitoring dan pembinaan pegawai	■	■	■
		Tidak seluruh pegawai mau memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal	Seluruh pegawai memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas	Sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi informasi		■	■
		Tidak semua pegawai memahami rencana pembangunan Zona Integritas	Semua pegawai memahami rencana pembangunan Zona Integritas	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM	■		
		Belum semua pegawai memahami kode etik PNS sesuai Permenperin No. 30/M-IND/PER/6/2013.	Pegawai BBKK memahami kode etik PNS	Sosialisasi dan implementasi kode etik dan etos kerja	■	■	■
		Perlunya peningkatan kesadaran tentang pentingnya kualitas dan produktivitas kerja	Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kualitas dan produktivitas kerja	Sosialisai tentang pelayanan prima dan budaya kerja	■	■	■
2.	Penataan Tata Laksana						
		SOP-AP yang ada masih harus terus disempurnakan	Tersedianya SOP-AP yang selalu mutahir sesuai dengan tugas pokok.	Review SOP-AP	■	■	■

No	Area Perubahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Program/Kegiatan	Tahun		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sistem Informasi belum optimal dalam membantu pelayanan publik.	Sistem Informasi Mendukung Pelayanan Publik Secara Optimal.	Pengembangan dan penerapan Sistem Informasi.			
		Sebagian pekerjaan pengelolaan SDM dilakukan secara manual.	Intranet BBKK dan informasi kepegawaian dapat mendukung pengelolaan informasi SDM BBKK.	Pembangunan dan sosialisasi penerapan teknologi informasi Kepegawaian.			
		Fasilitas tata laksana pada intranet Kemenperin belum digunakan secara optimal.	Fasilitas tata laksana perkantoran Intranet Kemenperin dapat dioptimalkan	Sosialisasi pemanfaatan fasilitas Tata Laksana Intranet Kemenperin			
3	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia						
		Belum adanya pemerataan beban kerja diantara pegawai.	Beban kerja yang merata dan sesuai dengan jabatan dan kompetensi.	Pendistribusian beban kerja yang seimbang sesuai jabatannya melalui penerapan SKP			
		Perlu adanya *reward* untuk pegawai.	Tersedianya *reward* bagi pegawai.	Melakukan penilaian pegawai			
		Standar kompetensi jabatan belum detail.	Adanya standar kompetensi jabatan yang lebih detail.	Mengkaji ulang standar kompetensi pegawai			
		Banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun.	Adanya pegawai sebagai pengganti pegawai yang pensiun.	Pelatihan internal/ *transfer knowledge*			
				Mengusulkan tambahan pegawai			
4.	Penguatan Akuntabilitas						
		Renstra BBKK perlu selalu dikaji secara berkala.	Renstra BBKK dikaji secara berkala.	Reviu dan penyempurnaan Renstra			
5.	Penguatan Pengawasan						
		Belum seluruhnya aktivitas BBKK dilakukan penilaian resiko.	Semua kegiatan baik yang strategis maupun teknis telah dilakukan penilaian	Melengkapi analisis resiko pada SPIP dan implementasi			

No	Area Perubahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Program/Kegiatan	Tahun		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			resikonya.				
		Perlu ditingkatkannya implementasi *whistle blowing system.*	Pegawai dapat memanfaatkan fasilitas *whistle blowing system.*	Sosialisasi Whistle Blowing System kepada pegawai			
		Perlu ditingkatkannya implementasi penanganan benturan kepentingan di BBKK.	Meningkatnya implementasi penangananan benturan kepentingan di BBKK.	Review SOP terkait Benturan Kepentingan			
		Perlu melakukan peninjauan kembali atas Standar Pelayanan Minimal BBKK.	Standar Pelayanan BBKK sudah sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi.	Kaji ulang SPM			
6.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**						
		Perlunya peningkatan mutu pelayanan publik.	Meningkatnya mutu pelayanan publik.	Peningkatan mutu layanan publik			
		Perlunya informasi tentang kepuasan pelanggan dan integritas pelayanan publik.	Tersedianya informasi tentang kepuasan pelanggan dan integritas pelayanan publik.	Menyediakan informasi kepuasan pelanggan dan integrasi layanan publik			

Lampiran 2

MATRIK RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA UNIT KERJA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN TAHUN 2017

No.	Area Perubahan/Program	Kegiatan	Penangung Jawab	Bukti	Jadwal	Catatan
A.	Manajemen Perubahan					
1.	Monitoring dan pembinaan pegawai	- Pemantauan Kehadiran Pegawai Melalui CCTV - Menerapkan aturan izin keluar saat jam kerja - Membuat rekapitulasi surat izin keluar pegawai saat jam kerja	Kepegawaian	- Video CCTV - rekapitulasi surat izin pegawai	Juli 2017	
2.	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM	Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2015	TIM Pembangunan ZI	Notulen Rapat, daftar hadir, undangan, *screen shoot* e-pesan	Maret 2017	
3.	Sosialisasi dan implementasi kode etik dan etos kerja.	- Sosialisasi Permenperin Nomor 30 Tahun 2013 tentang kode etik - Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai	TIM Pembangunan ZI	- *Screen shoot* e-pesan - *Screen shoot* e-pesan	Maret 2017	
4.	Sosialisasi pelayanan prima dan budaya kerja	Pelatihan *Government Public Relation*	Bidang PJT	Copy sertifikat	Februari 2017	
		Pelatihan Pelayanan Prima	Kepegawaian	Program pelatihan, Copy sertifikat	November 2017	
		Pelatihan Pemasaran	Kepegawainan	Program pelatihan, Copy sertifikat	Oktober 2017	
		Capacity building	Kepegawaian	Daftar hadir	Februari 2017	
B.	Penataan Tata Laksana					
1.	Review SOP-AP dan dokumen sistem manajemen mutu integrasi	Penambahan/Revisi SOP-AP	Bagian/Bidang terkait	SOP hasil Revisi	Januari – Desember 2017	

No.	Area Perubahan/Program	Kegiatan	Penangung Jawab	Bukti	Jadwal	Catatan
		Penambahan/revisi dokumen SMM integrasi	Bagian/Bidang terkait	Dokumen SMM hasil revisi	Januari – Desember 2017	
2.	Pengembangan dan penerapan Sistem Informasi	Penerapan Sistem Informasi Sertifikasi	Informasi	Sistem Informasi Sertifikasi	April 2017	
		Pengembangan Sistem Informasi Administrasi keuangan	Informasi	Sistem Informasi Administrasi keuangan	Juni 2017	
		Penyempurnaan Sistem Informasi Laboratorium	Informasi	Sistem Informasi Laboratorium	Oktober 2017	
		Pembuatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	April 2017	
3.	Pembangunan dan sosialisasi penerapan teknologi informasi Kepegawaian	Pembuatan sistem informasi penugasan pegawai	Informasi	Print Screen aplikasi	Mei 2017	
		Sosialisasi sistem informasi penugasan pegawai	Informasi dan Kepegawaian	Daftar hadir	Juli 2017	
		Pembuatan sistem informasi kompetensi pegawai	Informasi	Print Screen aplikasi	Desember 2017	
4.	Sosialisasi pemanfaatan fasilitas Tata Laksana Intranet Kemenperin	Sosialisasi pemanfaatan fasilitas Tata Laksana Intranet Kemenperin (e-disposisi, surat masuk dan surat keluar, dll)	Umum	Daftar hadir	Juni 2017	
C.	**Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia**					
1.	Pendistribusian beban kerja yang seimbang sesuai jabatannya melalui penerapan SKP	Evaluasi SKP oleh atasan	Bagian/Bidang/Sub Bag/Sie terkait	Hasil evaluasi SKP	Desember 2017	
2.	Melakukan penilaian pegawai untuk pelayan publik	Penyusunan tim penilai pegawai	Tata Usaha	SK tim penilai	Maret 2017	
		Menyusun SOP penilaian pegawai	Kepegawaian	SOP	April 2017	
3.	Mengkaji ulang standar kompetensi pegawai	Mengkaji ulang standar kompetensi pegawai sesuai jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepegawaian/	Hasil kaji ulang standar kompetensi pegawai	Mei 2017	
4.	Pelatihan internal/ *transfer knowledge*	Pelaksanaan magang internal untuk analis laboratorium	Kepegawaian	Laporan magang; program pelatihan	Januari – Desember 2017	
5.	Mengusulkan tambahan pegawai	Membuat usulan tambahan pegawai sesuai formasi	Kepegawaian	Surat usulan penambahan pegawai	April 2017	
		Rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL)	Kepegawaian	Kontrak pegawai; copy DIPA	Februari & April 2017	

No.	Area Perubahan/Program	Kegiatan	Penangung Jawab	Bukti	Jadwal	Catatan
D.	**Penguatan Akuntabilitas**					
1.	Reviu dan Penyempurnaan Renstra	Rapat reviu Renstra	Program	Daftar hadir, notulen rapat, copy Renstra	Oktober 2017	
		Tindak lanjut hasil reviu Renstra	Program	copy Renstra	Oktober 2017	
E.	**Penguatan Pengawasan**					
1.	Melengkapi analisis resiko pada SPIP dan implementasi SPIP	Penyusunan Analisis Resiko secara menyeluruh	Bagian/Bidang terkait	Laporan SPIP	April 2017	
		Monitoring Resiko	Bagian/Bidang terkait	Hasil monitoring	Per Triwulan	
2.	Sosialisasi Whistle Blowing System kepada pegawai	Sosialisasi WBS	Tata Usaha	*screen shoot* berita internal	Maret 2017	
3.	Review SOP terkait Benturan Kepentingan	Reviu SOP	PJT	SOP hasil reviu	Maret 2017	
		Sosialisasi SOP	PJT	Daftar hadir, notulen rapat	April 2017	
		Monitoring	PJT	Hasil monitoring	Per Triwulan	
4.	Kaji ulang SPM	Kaji ulang SPM	Bidang terkait	SPM hasil reviu	Mei 2017	
F.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**					
1.	Peningkatan mutu layanan publik	Peninjauan kembali Standar Pelayanan Minimal BBKK.	PJT	SPM hasil reviu	Mei 2017	
		Melakukan evaluasi hasil Survey Kepuasan Pelanggan	PJT	Hasil evaluasi	Per Triwulan	
		Memberikan pelatihan personil pelaksana layanan publik	PJT	Program dan Laporan pelatihan	Januari – Desember 2017	
		Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik	PJT	Dokumen pengadaan	Januari – Desember 2017	
		Monitoring mutu layanan publik	PJT	Hasil monitoring	Per Triwulan	
2.	Menyediakan informasi kepuasan pelanggan dan integrasi layanan publik	Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan	PJT	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan	Per Triwulan	
		Penyempurnaan Instrumen survey	PJT	Kuesioner pelanggan	April 2017	
		Penyempurnaan metode pengambilan responden survey	PJT	*Screen shoot*, bukti pengiriman	April 2017	

Lampiran 3

MATRIK PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN TAHUN 2017

No.	Program	Kegiatan	Indikator	Progress (%)				Bukti Fisik
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	